

APAKAH IPM, PENGANGGURAN, DAN PENDAPATAN PEREMPUAN BERPENGARUH DALAM MENURUNKAN KEMISKINAN DI KOTA SURABAYA?

Salva Aulia Abda

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: salva.18046@mhs.unesa.ac.id

Hendry Cahyono

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: hendrycahyono@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh IPM, pengangguran, dan sumbangan pendapatan perempuan terhadap kemiskinan di Kota Surabaya. Menggunakan analisis kuantitatif dengan data time series dari tahun 2010-2020 dengan metode multiple regression analysis. Hasil menunjukkan kemiskinan di kota Surabaya mampu dijelaskan oleh variable IPM, pengangguran, dan sumbangan pendapatan perempuan sebesar 96.54% (R^2). Ditemukan bahwa variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai probabilitas 0,0008. Variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai probabilitas 0.0495. Sedangkan sumbangan pendapatan perempuan tidak berpengaruh dan tidak signifikan dengan nilai probabilitas 0.1837. Secara simultan ketiga variabel berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas 0.000018.

Kata Kunci : kemiskinan, IPM, pengangguran, sumbangan pendapatan perempuan

Abstract

This study aims to determine the effect of HDI, unemployment, and the contribution of women's income to poverty in the city of Surabaya. Using quantitative analysis with time series data from 2010-2020 with multiple regression analysis method. The results show that poverty in the city of Surabaya can be explained by the variable HDI, unemployment, and the contribution of women's income by 96.54% (R^2). It was found that the HDI variable had a negative and significant effect with a probability value of 0.0008. The open unemployment rate variable has a positive and significant effect with a probability value of 0.0495. While the contribution of women's income has no effect and is not significant with a probability value of 0.1837. Simultaneously, the three variables have a significant and significant effect on poverty with a probability value of 0.000018

Keywords: poverty, HDI, unemployment, contribution of women's income

PENDAHULUAN

Kota Surabaya dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Timur menjadi salah satu kota terpadat di Indonesia setelah Jakarta. Disebut sebagai Kota Metropolitan, Kota Surabaya tidak luput dari berbagai permasalahan, termasuk kemiskinan yang masih melekat. Memiliki letak strategis yang terdiri dari 31 kecamatan dan 154 kelurahan membuat Kota Surabaya terhubung dengan kota-kota disekitarnya. Data yang diperoleh dari BPS, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk sebesar 2,89 juta jiwa atau dapat dikatakan 7 persen dari total penduduk Indonesia diantaranya berada di Kota Surabaya. Pada tahun 2019 rasio jenis kelamin Kota Surabaya sebesar 98,88 artinya, dalam seratus penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 98 sampai 99 penduduk berjenis kelamin laki-laki, dimana total penduduk dengan kategori miskin di Jawa Timur sebesar 4,11 juta jiwa dimana 3,17 persen terletak di Kota Surabaya (Kota Surabaya, 2020).

Pertumbuhan penduduk kota Surabaya termasuk dalam kategori tinggi dengan pertumbuhan yang tidak merata, dimana faktor migrasi menjadi salah satu faktor yang mendominasi pertumbuhan penduduk di Kota Surabaya (Indahri, 2017). Pada penelitian Sjafari, (2014) mengungkapkan apabila perpindahan penduduk dari desa ke kota jika tidak disertai dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni justru akan meningkatkan kemiskinan. Banyaknya penduduk miskin di perkotaan mengakibatkan persoalan sosial antara lain tingkat pengangguran menjadi tinggi, kriminalitas meningkat, kawasan kumuh dan persoalan-persoalan lain yang masih menjadi tugas pemerintah dalam upaya menangani kemiskinan.

Bersumber dari BPS garis kemiskinan Kota Surabaya pada tahun 2020 sebesar Rp 592.137,- per kapita, angka yang naik sebesar 4,35 persen dari tahun 2019, sementara indeks kedalaman (P1) meningkat sejumlah 0,25 poin dan indeks keparahan (P2) juga mengalami peningkatan sebanyak 0,09 poin. Apabila dilihat secara umum tingkat kemiskinan Kota Surabaya mengalami penurunan dari tahun 2010-2020, kecuali pada tahun 2015 kenaikan disebabkan karena tingginya harga bahan bakar minyak, sedangkan pada tahun 2020 kemiskinan meningkat akibat adanya pandemi Covid-19 dimana kondisi perekonomian yang sedang melemah.

Persentase penduduk miskin Kota Surabaya pada tahun 2020 mencapai 145,67 ribu orang atau 5,02 persen, meningkat sebanyak 15,12 ribu orang dibandingkan tahun 2019 sebesar 130,55 ribu orang atau 4,51 persen. Dapat diinterpretasikan bahwa dalam satu tahun terakhir peningkatan jumlah penduduk miskin lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduknya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka kemiskinan dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat yang rendah, kondisi demikian dapat

berakibat buruk terhadap berbagai faktor seperti faktor sosial, budaya, pendidikan, keterampilan dan lain sebagainya (Amri, 2019).

Menurut Kuncoro dalam Dicky Wahyudi (2013) masyarakat miskin mempunyai jumlah sumber daya terbatas dengan produktivitas yang belum maksimal, adanya ketidaksempurnaan pasar (minimnya kapital) mengakibatkan upah menjadi rendah, tabungan serta investasi juga rendah, hal ini sesuai dengan teori Nurkse yang dinamakan teori lingkaran setan (*vicious circle of poverty*), dimana terdapat fenomena kemiskinan yang sulit dipecahkan, dibutuhkan usaha baik dari masyarakat maupun pemerintah yang tepat dan berkelanjutan.

Masalah kompleks yang ditimbulkan dari kemiskinan dapat diakibatkan dari berbagai aspek yang saling keterkaitan, diantaranya seperti tingkat pendidikan, pendapatan yang diperoleh, minimnya akses barang dan jasa, kondisi geografis, lingkungan serta gender (Sa'diyah & Arianti, 2012). Usaha yang dapat dilakukan guna menurunkan kemiskinan dan ketidaksetaraan adalah dengan memaksimalkan sumber daya manusia dan pendapatan (Yusuf & Sumner, 2015).

Ada berbagai faktor yang membuat kemiskinan sulit dihilangkan disebabkan karena kualitas sumber daya manusia yang tergolong rendah. Menurut Subandi, (2012) salah satu upaya atau strategi untuk menuntaskan masalah kemiskinan yaitu dengan pembangunan sumber daya manusia. Kualitas dari sumber daya manusia sendiri dapat diukur dari nilai indeks pembangunan manusia, apabila nilai IPM rendah mengakibatkan jumlah penduduk miskin meningkat (Ade et al., 2019). Indeks pengembangan manusia dapat ditinjau dari berbagai aspek baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat (Todaro, 2006). Dilansir dari BPS Kota Surabaya Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan sebesar 77,20% sampai dengan 82,23% dari tahun 2010-2020.

Tidak hanya pembangunan manusia, namun pengangguran juga mempunyai kaitan yang erat dalam memengaruhi tingkat kemiskinan Todaro (2003). Penelitian Soejoto & Karisma, (2013) mengemukakan bahwa pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Pekerja yang memiliki produktivitas rendah bekerja pada sektor informal dikarenakan kegiatan ekonomi tidak dapat menyerap pekerja yang memiliki tingkat pendidikan serta kemampuan rendah (Lacabana & Cariola, 2011). Hal ini akan berdampak pada tingkat pengangguran. Kota Surabaya memiliki TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) yang berfluktuasi dari 6,84% pada tahun 2010 menjadi 7,81% di tahun 2011, kemudian pada tahun 2011-2013 mengalami penurunan sampai dengan 5,32% dan kembali meningkat pada tahun 2015 sebesar 7,01% dan Tingkat Pengangguran Terbuka kembali meningkat sampai 9,79% di tahun 2020.

Kajian (Awumbilla, 2006) menyatakan kesetaraan gender (*equality*) dalam perekonomian akan menimbulkan efek yang baik dalam menurunkan kemiskinan. Adanya kontribusi perempuan di dunia kerja akan berdampak pada kontribusi mereka dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga. Kota Surabaya pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.472.015 jiwa, jumlah yang lebih banyak dari penduduk laki-laki yaitu sebanyak 1.436.294 jiwa. Namun dalam aktivitas perekonomian keterlibatan perempuan dirasa masih kurang.

Menurut sumber dari BPS sumbangan pendapatan perempuan Kota Surabaya tahun 2010-2014 mengalami peningkatan dari 33,24% sampai dengan 35,58% namun di tahun 2014-2015 mengalami penurunan dari 35,58% menjadi 35,28% setelah itu kembali meningkat dari tahun 2017 sebesar 35,45% sampai dengan 35,88% di tahun 2020. Salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan salah satunya dapat dilihat dari pendapatan rata-rata yang diperoleh daerah tersebut (Todaro, 2006).

Saat ini pemerintah di berbagai negara masih berupaya untuk membuat kebijakan terhadap bidang apa saja yang didorong untuk lebih cepat berkembang, serta bagaimana berinvestasi yang baik guna mendorong sektor tersebut, dalam hal ini untuk memaksimalkan dampak dari adanya kemiskinan yang menjadi isu pembahasan pembuat kebijakan (Christiaensen & Martin, 2018). Bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya terpaku pada pembangunan ekonomi saja.

Kajian yang memakai pendapatan perempuan yang menjadi *predictor variable* terhadap kemiskinan masih terbatas serta keterlibatan diantara variabel-variabelnya masih berupa *oneway relationship* (satu arah) dengan analisis skala mikro seperti pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Karena keadaan (kemiskinan) yang dihadapi dapat menjadi pemicu perempuan untuk ikut serta dalam perekonomian guna meningkatkan kualitas hidup. Penelitian ini berusaha mengisi gap tersebut dimana sumbangan pendapatan perempuan menjadi salah satu variabel prediksi.

Teori kemiskinan menurut Michael Sherraden dibagi menjadi tiga, yakni terdiri dari teori *human behavior*, teori *culture of poverty* serta teori struktural. Sebagaimana penelitian Remi dan Tjiptoherijanto (2002) menunjukkan bahwa berhasil tidaknya program dalam menurunkan kemiskinan tergantung pada identifikasi wilayah dimana mereka tinggal dan kelompok yang miskin. Sejalan dengan penelitian Todaro (2006) bahwa dalam menentukan kebijakan yang tepat dibutuhkan wawasan secara mendalam tentang siapakah yang terbelang kedalam kelompok miskin itu, dan bagaimana karakteristiknya.

Menurut Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, setiap manusia memiliki kesempatan untuk andil dalam proses pembangunan, dan memenuhi haknya seperti mendapat pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Indikator yang dapat diterapkan untuk menilai pengembangan kualitas hidup manusia serta dapat digunakan sebagai tolok ukur dan evaluasi terhadap kinerja daerah. Salah satu program UNDP adalah Indeks Pembangunan Manusia dengan pengendalian kemiskinan melalui tiga indeks yaitu pendidikan, kesehatan dan kemampuan membayar (Hariwan & Swaningrum, 2015).

Menurut Haq, (2015) dalam mengukur kualitas hidup manusia IPM memiliki tiga aspek mencakup pengetahuan, pendidikan, harapan hidup dan standard hidup layak. Namun IPM juga belum tentu merepresentasikan kondisi yang sesungguhnya dimana suatu daerah dapat mengalami ketimpangan. Meskipun begitu IPM menjadi salah satu indikator yang berguna dalam mengetahui kualitas hidup yang baik.

Pengangguran adalah masalah krusial yang sering kali muncul dalam permasalahan ekonomi, angka pengangguran yang tinggi merupakan akibat yang ditimbulkan dari kemiskinan. Penelitian Giovanni, (2018) menyebutkan bahwa pengangguran berdampak pada kemiskinan. Variable yang banyak dipakai untuk mengulas berhasil tidaknya penurunan pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka. Adanya TPT sebagai akibat dari rendahnya kesempatan kerja daripada tenaga kerja, yang berimbas pada banyaknya tenaga kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan (Sukirno, 2003).

Dalam kajian (Bradshaw et al., 2017) menyebut adanya istilah feminisasi kemiskinan, penelitian tersebut menggambarkan bahwa perempuan lebih banyak hidup dalam kemiskinan dibandingkan laki-laki. Sebagai contoh, persentase penduduk perempuan miskin Indonesia selama tahun 2015-2019 menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan laki-laki (Bappenas, 2020). Sehingga dapat memengaruhi kualitas hidup perempuan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari sumbangan pendapatan yang menjadi salah satu aspek ekonomi terkait dengan kesejahteraan penduduk. Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup seluruh pengasilan termasuk semua tunjangan perempuan Kota Surabaya.

Todaro (2006) mengungkapkan apabila status ekonomi perempuan lebih rendah mengakibatkan kualitas hidup keluarga termasuk anak-anaknya akan tetap rendah. Sehingga apabila kaum perempuan diikutsertakan dari tiap generasi dengan upaya perbaikan status yang menunjang kesejahteraan dalam proses pembangunan akan berhasil dicapai sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia (Todaro, 2006). Kesenjangan yang dihadapi oleh perempuan akan

berdampak terhadap lemahnya kekuatan ekonomi perempuan yang berujung pada naiknya tingkat kemiskinan perempuan (Oyekanmi & Moliki, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan perempuan berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Surabaya, sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui IPM, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan perempuan berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan di Kota Surabaya, dengan mendapati faktor apa saja yang dapat memengaruhi kemiskinan, solusi akan lebih spesifik dan mudah dievaluasi untuk menerapkan suatu kebijakan.

METODE PENELITIAN

Analisis kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan asosiatif tujuannya untuk mengetahui diantara dua variabel atau lebih apakah terdapat pengaruh atau tidak (Sugiyono, 2014). Populasi penelitian ini adalah data IPM, tingkat pengangguran terbuka, sumbangan pendapatan perempuan dan kemiskinan di Kota Surabaya sedangkan sampelnya adalah IPM, tingkat pengangguran terbuka, sumbangan pendapatan perempuan dan kemiskinan pada tahun 2010-2020.

Penelitian ini menerapkan teknik sampling jenuh, dimana seluruh elemen masyarakat yang termasuk dalam penduduk di Kota Surabaya, karena data sudah konkret dan menjadi laporan tahunan yang diterbitkan lembaga yang terkait yaitu Badan Pusat Statistik. Sumber data berbentuk data sekunder dari tahun 2010-2020 menggunakan runtut waktu (*time series*). Data yang diperoleh akan dianalisis apakah terdapat pengaruh pada IPM, pengangguran dan kontribusi pendapatan perempuan terhadap kemiskinan di Kota Surabaya.

Definisi operasional dalam penelitian ini antara lain kemiskinan yang didefinisikan sebagai persentase penduduk Kota Surabaya di bawah garis kemiskinan pada 31 kecamatan selama periode tahun 2010-2020. Data yang digunakan dalam satuan persen. Indeks Pembangunan Manusia di tiap kecamatan di kota Surabaya periode tahun 2010-2020 dalam satuan persen. Indikator pengangguran yang digunakan adalah tingkat pengangguran terbuka di 31 kecamatan di Kota Surabaya selama periode tahun 2010-2020. Data yang digunakan dalam satuan persen. Sumbangan pendapatan perempuan di tiap kecamatan Kota Surabaya periode tahun 2010-2020. Data yang digunakan dalam persen.

Metode analisis menggunakan *multiple regression analysis* dengan tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0.05$) penggunaan model regresi linear berganda selain dapat mengungkapkan signifikansi pengaruh IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan sumbangan Pendapatan Perempuan terhadap kemiskinan, juga dapat menunjukkan penjelasan statistik yang dapat dihitung melalui nilai (R^2), nilai (F), dan nilai (t). Analisis regresi berganda dapat diterapkan untuk memproyeksikan lebih dari satu variabel terikat. Penelitian ini menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y : \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + \mu_i$$

Dimana:

Y : kemiskinan

α : konstanta

b_1, b_2, b_3 : koefisien regresi

X_1 : IPM

X_2 : tingkat pengangguran terbuka

X_3 : kontribusi pendapatan perempuan

μ_i : residual/error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model regresi harus menyertakan uji asumsi klasik yang dilakukan dalam model regresi linear, karena variable-variabel yang diuji menjadi tidak efisien apabila uji asumsi klasik tidak dilakukan. Setelah memperoleh data kemudian diolah, diregresikan dan diinterpretasikan. Untuk mengukur ketepatan sampel dengan fungsi regresi, dilakukan uji signifikansi yang bisa dihitung dari nilai *goodness of fit*nya. Uji asumsi klasik meliputi hasil uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas dengan tingkat signifikansi sebesar 5%.

Uji normalitas menggunakan *Jarque-Bera Test* tujuannya untuk mengetahui residual terdistribusi normal atau tidak. Dalam asumsi klasik melalui pendekatan OLS merupakan data residual dengan model regresi linier yang terdistribusi normal. Hasilnya didapatkan nilai *Jarque-Bera* sejumlah $0.775545 > 0.05$ artinya data berdistribusi normal.

Uji autokorelasi dilakukan menggunakan LM (*Lagrange Multiplier*) Test. Dalam uji autokorelasi apabila nilai Prob. Chi-Square hitung $> 0,05$ artinya tidak

terjadi autokorelasi. Jika nilai Prob. Chi-Square hitung $< 0,05$ maka dapat disimpulkan terjadi autokorelasi. Dalam uji Autokorelasi didapatkan hasil bahwa nilai Prob. Chi-Square sebesar $0.2854 > 0.05$ artinya tidak terjadi autokorelasi.

Uji multikolinieritas menggunakan *VIF (Variance Inflation Factors)*. Apabila nilai *VIF* $< 10,00$ menandakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas didapatkan hasil dari ketiga variabel bebas yakni IPM memiliki nilai *VIF* sebesar $4.256442 < 10,00$ pengangguran sebesar $1.077482 < 10,00$ dan kontribusi pendapatan perempuan sebesar $4,104989 < 10,00$. Dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas IPM, pengangguran dan kontribusi pendapatan perempuan kurang dari $10,00$ artinya terbebas dari multikolinearitas.

Dilanjutkan dengan uji heteroskedastisitas menggunakan *Uji Glejser* didapatkan hasil nilai Prob. Chi Square sebesar $0,3770 > 0,05$ yang artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. dengan demikian persamaan regresi sudah memenuhi syarat uji normalitas. Setelah dilakukan uji asumsi klasik, hasilnya data-data tersebut lolos uji asumsi klasik dengan derajat kepercayaan 95% atau nilai signifikansi $\alpha (0,05)$.

Berikut tabel hasil regresi yang memperlihatkan hasil uji statistik:

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	37.41937	2.286008	16.36887	0.0000
X1	-0.330863	0.058806	-5.626311	0.0008
X2	0.098764	0.041649	2.371316	0.0495
X3	-0.170681	0.115714	-1.475025	0.1837
R-squared	0.965487	Mean dependent var		5.721818
Adjusted R-squared	0.950695	S.D. dependent var		0.755841
F-statistic	65.27368	Durbin-Watson stat		1.520108
Prob(F-statistic)	0.000018			

Sumber: data diolah penulis, 2021

Setelah itu dilakukan pengujian statistik yang diketahui dari nilai (R^2) koefisien determinan, nilai (F) simultan dan nilai (t) parsial. Hasilnya variabel IPM, pengangguran, dan sumbangan pendapatan perempuan secara simultan dapat dijelaskan dengan baik dan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan.

Hasil pengujian memperlihatkan nilai probabilitas yang akan dijelaskan sebagai berikut: (1) Nilai probabilitas IPM bernilai $0,0008 < 0,05$ menyatakan

IPM berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan. (2) Nilai probabilitas Tingkat Pengangguran Terbuka bernilai $0,04967 > 0,05$, menunjukkan pengangguran mempunyai hubungan yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. (3) Nilai probabilitas Sumbangan pendapatan Perempuan bernilai $0,1837 > 0,05$ menjelaskan bahwa Sumbangan pendapatan perempuan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Uji Signifikansi Simultan (uji F) memperlihatkan nilai F statistik $0,000018 < 0,05$. Kesimpulannya variabel IPM, pengangguran dan sumbangan pendapatan perempuan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan

Berdasarkan uji parsial (t) mempunyai arti bahwa IPM memiliki pengaruh dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,0008 < 0,050$ dan nilai koefisien regresi $-0,33$ mempunyai pengaruh negatif (karena nilai koefisien negatif) sehingga apabila terjadi kenaikan variabel IPM sebesar 1 persen, maka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,33%. Sejalan dengan penelitian Ade et al., (2019) bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Penelitian yang sama disampaikan oleh Fadillah dkk. (dalam Suritpo dan Subayil 2020) menyimpulkan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Desi Yulianti 2016 (dalam Ade et al., 2019) juga menunjukkan hasil yang sama. Dalam penelitian Suropto dan Subayil (2020) pada tahun 2010-2017 di 5 Kabupaten/kota di Provinsi Yogyakarta. Hasilnya variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Selaras pernyataan Arsyad (2010) yang mengatakan bahwa upaya dalam menurunkan tingkat kemiskinan salah satunya dengan pembangunan di bidang sumber daya manusia.

Kajian Sjafi'i dan Hidayati, 2009 (dalam Suliswanto 2012) membahas bahwa SDM yang berkualitas merupakan indikator yang penting bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi. Bahkan negara-negara dengan julukan macan asia, seperti Korea Selatan, Singapura, Taiwan, Hongkong telah memberikan pengalaman bahwa pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan melalui investasi SDM (melalui pendidikan) yang dibuktikan lebih baik dibandingkan dengan investasi fisik seperti gedung, dan infrastruktur lainnya.

Penelitian ini diperkuat dengan kajian Suliswanto, (2012) bahwa variabel IPM lebih dominan dalam mengurangi angka kemiskinan di masing-masing

provinsi. Oleh karena itu masalah yang menyangkut kemiskinan belum cukup hanya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menginginkan adanya *trickle down effect*, jauh dari itu dengan optimalisasi SDM justru akan memberikan dampak yang lebih besar untuk mengurangi angka kemiskinan yang terjadi.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya berada diatas rata-rata dimana nilai IPM diatas 80 yang masuk dalam katagori IPM sangat tinggi yakni (≥ 80) berdasarkan Direktorat Analisis Dan Pengembangan Statistik. Sehingga perlu dioptimalkan untuk menunjang kualitas pembangunan manusia melalui berbagai indikator terkait harapan lama sekolah, angka harapan hidup, serta standar hidup yang layak. Apabila ketiga indikator tersebut berjalan dengan baik maka dipastikan sumber daya manusia dapat lebih berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan serta pembangunan ekonomi.

Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dapat di lihat dari nilai signifikasinya sebesar $0,0495 < 0,05$. Nilai koefisien regresi 0,09 menunjukkan bahwa memiliki pengaruh positif (karena nilai koefisien positif) yang dapat diinterpretasikan apabila terjadi kenaikan variabel pengangguran sebesar 1 persen maka variabel kemiskinan mengalami peningkatan sejumlah 0,09 dengan asumsi variabel lain bersifat konstan.

Sejalan dengan penelitian Kurniawan, (2018) yang mengambil sampel di Kota Surabaya pada tahun 2007-2016, hasilnya pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Surabaya dengan nilai probabilitas sebesar 0.0203. Penelitian ini di dukung juga oleh Saunders 2002 (dalam Kurniawan 2018) yang mengatakan bahwa pengangguran yang terjadi terus menerus dan dikategorikan tinggi dapat meningkatkan permintaan program kesejahteraan negara dan mengurangi pendapatan negara dikarenakan konsekuensi kemiskinan. Begitu juga penelitian Permana & Arianti, (2012) dimana pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di jawa tengah.

Begitu juga penelitian Soejoto & Karisma (2013) dalam penelitiannya menunjukkan adanya hubungan searah antara pengangguran dan kemiskinan dimana menunjukkan tanda positif, yang dapat diinterpretasikan bahwa apabila pengangguran mengalami kenaikan, maka diikuti oleh kemiskinan juga akan meningkat. Penelitian yang sama juga pernah dilakukan Rika et al., (2012) dimana jumlah pengangguran di DKI Jakarta mengalami penurunan tiap tahunnya. Hasil

penelitian variabel memperlihatkan pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan.

Terdapat beberapa penelitian yang telah menunjukkan adanya pengaruh terhadap kemiskinan tidak lain dikarenakan masih rendahnya kualitas SDM, dimana teknologi berkembang sangat pesat dan semakin tingginya persaingan para pencari pekerjaan. Seiring bertambahnya tahun banyak penduduk bermigrasi untuk mencari pekerjaan, oleh karena itu beban yang ditanggung juga semakin berat. Di samping itu jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja khususnya orang-orang dengan tingkat pendidikan yang rendah dan minimnya keahlian akan sulit untuk bersaing sehingga menyebabkan pengangguran.

Disisi lain Pemkot Surabaya telah menangani kemiskinan melalui berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Mulai dari perluasan kesempatan kerja, skema tentang penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan melalui berbagai pengembangan, memperluas sekaligus meningkatkan permodalan bagi masyarakat (kurang mampu) yang kekurangan modal usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), alokasi dana bantuan yang ditujukan untuk siswa miskin, pembinaan PKL serta usaha untuk membangkitkan perekonomian melalui UMKM pasca pandemi.

Pengaruh Sumbangan Pendapatan Perempuan terhadap Kemiskinan

Pendapatan perempuan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai signifikansi sebesar $0,1837 > 0,005$ dan memiliki nilai koefisien sebesar $-0,17$ yang artinya apabila terjadi kenaikan variabel sumbangan pendapatan perempuan sebesar 1% maka variabel kemiskinan mengalami penurunan sebesar $-0,17$ dengan asumsi variabel lain bersifat konstan.

Berbeda dengan penelitian Raya (2021) yang berjudul urgensi penurunan ketimpangan gender dalam menanggulangi kemiskinan di Jawa Timur. Variabel independen rasio sumbangan pendapatan perempuan berpengaruh signifikan secara parsial dengan hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dalam kajian tersebut menjelaskan partisipasi perempuan dalam perekonomian yang berfokus pada peningkatan pendapatan berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan di Jawa Timur. Begitupula kajian Rustinsyah 2018 (dalam Adnan & Amri, 2020) menyimpulkan bahwa pendapatan perempuan yang diperoleh dalam program pemberdayaan dibidang ekonomi dapat menumbuhkan kesejahteraan, serta dapat menurunkan kemiskinan di masyarakat.

Penelitian ini didukung oleh Andiny & Mandasari (2017) yang menyimpulkan variabel kemiskinan tidak berpengaruh terhadap variabel ketimpangan pendapatan. Miller (dalam Arsyad, 2006) mengatakan apabila pendapatan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum, namun masih terpaut jauh dari masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih dikategorikan dalam keadaan miskin. Menurut Miller kemiskinan yang terjadi dapat ditentukan oleh keadaan sekitar.

Secara umum pendapatan perempuan pada setiap daerah berbeda jika dikaitkan dengan tingkat kemiskinan. Apabila dilihat dari tataran rumah tangga, jumlah pendapatan dengan pengeluaran tidak sama antar individu, serta jumlah beban tanggungan dan keperluan yang tidak sama. Adapun masyarakat dengan kategori miskin yang mempunyai usaha kecil menengah dengan jumlah beban tanggungan yang banyak hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sebagaimana penelitian Adioetomo (2010) menjumpai bahwa tingginya *dependency ratio* maka tinggi beban yang ditanggung juga semakin tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan dalam perekonomian belum mampu berkontribusi mengurangi angka kemiskinan di Kota Surabaya

Selain itu, penduduk perempuan yang bekerja disektor dengan produktivitas yang tinggi seperti pertambangan, gas, komunikasi dan informasi masih sedikit, karena sebagian besar perempuan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai/pekerja keluarga, dengan begitu sumbangan pendapatan perempuan belum berdampak secara signifikan dalam menurunkan kemiskinan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mendapati ketidakseimbangan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena karena strategi *Pembangunan Responsif Gender* (PRG) belum diterapkan secara efektif. Keterlibatan perempuan di bidang ekonomi belum dipandang sebagai subjek pembangunan namun hanya menjadi objek (KPPPA, 2016).

Pengaruh IPM, Pengangguran, dan Sumbangan Pendapatan Perempuan terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (uji F) menunjukkan nilai probabilitas F statistik sebesar $0,0000018 < 0,05$. Artinya, variabel IPM, pengangguran dan sumbangan pendapatan perempuan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Untuk mengetahui besarnya variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen dengan melihat nilai R-squared (R^2) yang bernilai 0.965487. Sehingga kesimpulannya ketiga variabel yakni IPM, pengangguran dan sumbangan pendapatan perempuan memiliki pengaruh

terhadap kemiskinan sebesar 96,54% sementara untuk sisanya sebesar 3,46% diluar model dan jelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian.

Hasil penelitian ini berhasil menjawab tujuan penelitian dimana ketiga variabel yaitu IPM, pengangguran dan sumbangan pendapatan perempuan berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan di Kota Surabaya. Hasil penelitian ini sejalan dengan Fadlilah et al., (2016) bahwa pendapatan perkapita, tingkat pengangguran, IPM dan pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2009-2013. Pada penelitian tersebut ditemukan kesamaan bahwa apabila tingkat pengangguran bertambah maka jumlah penduduk miskin bertambah. Apabila IPM dan pendapatan meningkat, maka jumlah penduduk miskin berkurang. Namun perbedaannya pada penelitian tersebut memiliki empat variabel independen yaitu pertumbuhan penduduk, sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa IPM, tingkat pengangguran terbuka dan sumbangan pendapatan perempuan berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Surabaya. Variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (dapat dilihat bahwa nilai IPM Kota Surabaya yang terus meningkat). Hal ini menunjukkan bahwa dari segi kesehatan, pendidikan juga daya beli masyarakat harus dioptimalkan. Pemerintah juga dapat memberikan pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan secara gratis khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu, dengan begitu kualitas SDM akan lebih meningkat. Variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dengan memberikan pelatihan kerja gratis dan memberikan program pendampingan bagi masyarakat miskin, sehingga memiliki keterampilan (*soft skill* dan *hard skill*) yang mampu bersaing di era teknologi digital, dengan ini tenaga kerja yang diserap akan banyak, dan tingkat pengangguran akan berkurang. Variabel sumbangan pendapatan perempuan tidak berhubungan dan tidak signifikan terhadap kemiskinan maka perlu kebijakan yang mengikutsertakan perempuan dalam kegiatan perekonomian melalui pemberdayaan gender, pemberian insentif bagi perempuan terutama pemilik usaha kecil menengah, pengembangan industri rumah tangga sehingga memiliki manfaat dan harga jual yang lebih tinggi guna meningkatkan kesejahteraan perempuan yang dapat menurunkan kemiskinan.

REFERENSI

Ade, M., Ariwuni, D., & Kartika, I. N. 2019. Pengaruh PDRB dan Pengeluaran

Pemerintah terhadap IPM dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Journal EP Unud*. 8 (12): 2927–2958.

Adioetomo, S.M. 2010. *Dasar-dasar Demografi*. Salemba Empat. Jakarta.

Adnan, G., & Amri, K. 2020. Apakah Pendapatan Perempuan Dapat Mengurangi Kemiskinan: Bukti Data Panel di Indonesia. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*. 8 (1). 64.

Andiny, P., & Mandasari, P. 2017. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*. 1 (2): 196–210.

Awumbilla, M. 2006. Gender equality and poverty in Ghana: Implications for poverty reduction strategies. *GeoJournal*. 67: 149–161.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. *Tanggapan Studi Perlindungan Kesehatan Bagi Perempuan Miskin Di Indonesia*. BPPN.

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya 2020. *Kota Surabaya dalam Angka Surabaya municipality in figures 2020*. Kota Surabaya. BPS.

Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2019. *Data persentase kemiskinan Kota Surabaya*. Jawa Timur. BPS.

Bradshaw, S., Chant, S., & Linneker, B. 2017. Gender and poverty: what we know, don't know, and need to know for Agenda 2030. *Gender, Place and Culture*. 24 (12): 1667–1688.

Christiaensen, L., & Martin, W. 2018. Agriculture, structural transformation and poverty reduction: Eight new insights. *World Development*. 109. 413–416.

Dicky Wahyudi, T. W. R. 2013. Analisis Konsentrasi Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economics*. 2 (1): 1–16.

Fadlilah, N., Sukiman, & Dewi, A. S. 2016. Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita Tingkat Pengangguran, IPM Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Eko Regional*. 11 (1): 3.

Giovanni, R. 2018. Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. *Economics Development Analysis Journal*. 7 (1): 23–31.

Hariwan, P., & Swaningrum, A. 2015. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran Di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 8 (1): 1-112.

- Haq, U., & Amin, A. 2014. The role of working women in poverty reduction (A case study of District Peshawar), *The Dialogue*. 12 (2): 109-134.
- Indahri, Y. 2017. Tantangan Pengelolaan Penduduk Di Kota Surabaya. *Jurnal Aspirasi*. 8 (1): 1–27.
- KPPPA. (2016). *Peran Perempuan Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. KPPA. Jakarta
- Lacabana, M., & Cariola, C. (2003). Globalization and metropolitan expansion: Residential strategies and livelihoods in Caracas and its periphery. *Sage Journals*. 1 (15).
- Kurniawan, R. A. 2018. Pengaruh pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*. 6 (2): 103–109.
- Nisrina, N. A. 2019. Analisis Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Dan Alokasi Government Expenditure Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada 38 Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2012-2017. *Jurnal Ilmiah*. 10 (2).
- Oyekanmi, A. A., & Moliki, A. O. 2021. an Examination of Gender Inequality and Poverty Reduction. *Journal of Sustainable Development in Africa*. 23 (1): 31–43.
- Permana, A. Y., & Arianti, F. 2012. Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah 2004-2009. *Diponegoro Journal of Economics*. 1 (1).
- Raya, J. W. 2021. Urgensi Penurunan Ketimpangan Gender Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Jawa Timur. *Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance*. 1: 117–156.
- Remi, Sutyastie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijanto. 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Rika, D., & Puruwita, D. 2012. Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan Investasi Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Econo Sains*. (10): 144–157.
- Sa'diyah, Y. H., & Arianti, F. 2012. Analisis Kemiskinan Rumah Tangga melalui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi di Kecamatan Tugu Kota Semarang. *Diponegoro Journal Of Economis*. 1(1). 1–11.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

- Sukirno, Sadono. 2003. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Salemba. Jakarta.
- Sjafari, A. 2014. *Kemiskinan dan pemberdayaan kelompok*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Soejoto, A., & Karisma, A. 2013. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*. 1 (3): 1–15.
- Suripto, & Subayil, L. 2020. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di D.I. Yogyakarta Periode 2010-2017. *Ilmiah Ekonomi Pembangunan*. 1 (2): 127–143.
- Suliswanto, M. 2012. Pengaruh Produk Domestik Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia. *Ub Malang*. 3 (3); 1-3.
- Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga. Jakarta.
- Todaro, Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1*. Edisi 9. Erlangga. Jakarta.
- Yusuf, A. A., & Sumner, A. 2015. Growth, Poverty and Inequality under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 51 (3): 323–348.